



## Perspektif Pengusaha, Profesional dan Aparatur Sipil Negara terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan di Kota Pekalongan

Makhmudah Makhmudah<sup>1</sup>, Sobrotul Imtikhanah<sup>2</sup>, M. Fitrayudhi Triatmaja<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan, Indonesia, [ida.makhmudah2023@gmail.com](mailto:ida.makhmudah2023@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan, Indonesia, [emmaferdiz.umpp@gmail.com](mailto:emmaferdiz.umpp@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan, Indonesia, [fithrayudi@gmail.com](mailto:fithrayudi@gmail.com)

Corresponding Author: [ida.makhmudah2023@gmail.com](mailto:ida.makhmudah2023@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study examines the ethical perspectives of entrepreneurs, accounting professionals, and civil servants (ASN) regarding financial statement preparation practices in Pekalongan City. Motivated by the increasing complexity of financial reporting and the risks of earnings management, this research investigates how different occupational groups respond to ethically challenging scenarios, particularly those related to discretionary accounting decisions and information disclosure. Using a quantitative descriptive method supported by a modified Likert scale questionnaire adapted from Clikeman and Henning (2000), responses were collected from 75 participants representing three occupational categories. The results indicate divergent ethical tendencies among groups: entrepreneurs are more tolerant of strategic reporting decisions, professionals exhibit the strongest adherence to formal accounting ethics, and civil servants demonstrate a balanced orientation emphasizing transparency and public accountability. The findings highlight that occupational background significantly shapes ethical judgments and reporting preferences. These insights can assist regulatory bodies, corporate stakeholders, and educational institutions in understanding ethical gaps across professional groups and strengthening governance frameworks to prevent earnings manipulation.*

**Keywords:** *Ethics, Financial Reporting, Entrepreneurs, Professionals, Civil Servants*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji perspektif etis pengusaha, profesional akuntansi, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap praktik penyusunan laporan keuangan di Kota Pekalongan. Berangkat dari meningkatnya kompleksitas pelaporan keuangan dan risiko manipulasi laba, penelitian ini menelaah bagaimana kelompok pekerjaan berbeda merespons situasi dilematis dalam akuntansi, khususnya pada keputusan diskresioner dan pengungkapan informasi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan kuesioner skala Likert yang dimodifikasi dari Clikeman dan Henning (2000), melibatkan 75 responden yang merepresentasikan tiga kategori pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan etika: pengusaha lebih toleran terhadap keputusan pelaporan yang strategis,

profesional akuntansi memiliki kepatuhan etis tertinggi, sedangkan ASN menunjukkan orientasi moderat yang menekankan transparansi dan akuntabilitas publik. Temuan ini menegaskan bahwa latar belakang pekerjaan berpengaruh terhadap penilaian etis dan preferensi pelaporan. Implikasi penelitian dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola, peraturan pengungkapan, dan pendidikan etika akuntansi guna mencegah praktik manipulasi laporan keuangan.

---

**Kata Kunci:** Etika, Laporan Keuangan, Pengusaha, Profesional, Aparatur Sipil Negara

---

## PENDAHULUAN

Etika dalam penyusunan laporan keuangan merupakan isu fundamental dalam akuntansi dan tata kelola perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya menjadi alat komunikasi bagi pemegang saham, kreditur, dan investor, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi yang memengaruhi berbagai pemangku kepentingan (Budiandru, 2025). Dalam konteks tersebut, integritas, objektivitas, dan transparansi penyusun laporan keuangan memainkan peran sentral dalam menjaga kepercayaan publik (Dajtnicka, Salsabila Helwani, & Wulandari, 2025). Ketika kualitas etika para penyusun terganggu, laporan keuangan berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai penyaji informasi yang andal dan relevan.

Fenomena ini semakin penting untuk dikaji karena praktik manipulasi dan pengelolaan laba (*earnings management*) kerap terjadi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan penuh tekanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tekanan pencapaian target kinerja, ketidakstabilan ekonomi, dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat mendorong manajemen melakukan tindakan yang secara etis meragukan (Dechow, Ge, & Schrand, 2010; Healy & Wahlen, 1999a). Di Indonesia sendiri, sejumlah kasus dan penelitian empiris mengungkap bahwa praktik *earnings management* sering terkait dengan motivasi oportunistik, tuntutan pasar, dan budaya organisasi yang permisif terhadap fleksibilitas akuntansi (Siregar & Utama, 2008; Wibowo, 2020). Kondisi tersebut menegaskan bahwa keputusan pelaporan keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai, orientasi moral, serta tata kelola perusahaan atau instansi tempat pengambil keputusan bekerja (Shafer & Simmons, 2011). Oleh karena itu, memahami perbedaan perspektif etika antara kelompok profesi seperti pengusaha, profesional akuntansi, dan ASN menjadi penting untuk memetakan bagaimana peran, pengalaman, dan ekspektasi lingkungan kerja memengaruhi keputusan etis dalam pelaporan keuangan.

Kota Pekalongan, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan sangat dinamis (Susanto, Ariyanto, & Kurniawan, 2016). Kota ini dikenal sebagai daerah dengan aktivitas industri yang kuat, terutama pada sektor tekstil dan batik (Faesol, 2024), perdagangan, usaha mikro–menengah (Ikhwan, 2021), serta didukung oleh sektor publik yang cukup besar dalam mengelola layanan pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah. Dengan struktur ekonomi seperti ini, berbagai entitas di Pekalongan mulai dari pelaku usaha, profesional akuntansi, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) secara rutin berinteraksi dengan sistem pelaporan keuangan, baik untuk kepentingan internal organisasi maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam praktiknya, ketiga kelompok ini menghadapi konteks tekanan dan tanggung jawab yang tidak sama. Pelaku usaha sering berhadapan dengan fluktuasi pasar, persaingan industri, serta kebutuhan menjaga stabilitas arus kas dan kinerja usaha, sehingga dilema pelaporan kerap muncul ketika terjadi tekanan finansial (Mia Angelina Setiawan & Helmayunita, 2017). Profesional akuntansi di Pekalongan, baik yang bekerja di kantor akuntan publik, lembaga keuangan, maupun perusahaan lokal, terikat pada standar profesional dan etika akuntansi yang menuntut objektivitas, akurasi, dan integritas tinggi (Sofyani Hafiez & Rahma Nadia, 2017).

Sementara itu, ASN baik yang bertugas di dinas-dinas teknis, unit akuntansi daerah, maupun instansi pelayanan publik didorong oleh prinsip transparansi, akuntabilitas anggaran, serta kepatuhan regulatif yang lebih ketat dibandingkan sektor privat (Nina Nursida, Eny Wahyuningsih, & Fitrasari, 2022)

Keragaman lingkungan kerja dan tekanan institusional tersebut menjadikan Kota Pekalongan sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji perbedaan orientasi etika dalam penyusunan laporan keuangan. Kota ini menggambarkan bagaimana pelaku ekonomi lokal dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batas-batas etis pelaporan keuangan, terutama terkait praktik yang berada dalam area abu-abu (*gray area*), seperti pengungkapan informasi sensitif, penilaian beban pelaporan, hingga keputusan yang mendekati *earnings management*. Dengan dinamika industri kreatif dan birokrasi daerah yang berkembang pesat, Pekalongan menyediakan konteks empiris yang kaya untuk menilai bagaimana nilai moral, tekanan organisasi, dan peran profesional membentuk praktik pelaporan keuangan di tingkat lokal.

Dengan demikian, fokus pada Kota Pekalongan tidak hanya memberikan gambaran mikro tentang etika pelaporan keuangan, tetapi juga menawarkan refleksi penting tentang bagaimana tata kelola perusahaan dan pemerintahan daerah di Indonesia perlu diperkuat melalui pendidikan etika, supervisi regulatif, dan penguatan standar profesi. Temuan-temuan yang dihasilkan dari konteks lokal ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi peningkatan integritas pelaporan keuangan, baik di Pekalongan maupun di daerah lain dengan kondisi ekonomi yang serupa.

Penelitian terdahulu oleh (Clikeman & Henning, 2000) menunjukkan bahwa kelompok profesi memiliki persepsi etika yang berbeda ketika berhadapan dengan skenario *earnings management*. Sementara itu, studi lokal seperti yang dilakukan (Yulianti & Fitriany, 2005) mengonfirmasi bahwa faktor pekerjaan dan budaya organisasi turut memengaruhi keputusan etis dalam pelaporan. Penelitian ini membangun dasar teoritis dari temuan tersebut, dengan fokus pada konteks sosial ekonomi Kota Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan perspektif etis antara pengusaha, profesional akuntansi, dan ASN dalam menghadapi skenario penundaan biaya *maintenance* sebagai bentuk *earnings management*. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali bagaimana ketiga kelompok tersebut menilai prinsip pengungkapan informasi dan tanggung jawab etika dalam pelaporan keuangan. Lebih jauh, penelitian ini mencoba menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi variasi pola etika di antara kelompok pekerjaan tersebut, baik dari segi latar belakang tugas, kepentingan institusional, maupun kerangka nilai profesional yang dianut masing-masing. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki signifikansi penting karena mampu memberikan gambaran mengenai kecenderungan etika pelaporan keuangan berdasarkan profesi, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi regulator, asosiasi profesi, dan para praktisi dalam memperkuat tata kelola, kualitas pengawasan, serta pengembangan pendidikan etika di masa depan.

Meskipun penelitian mengenai etika pelaporan keuangan dan *earnings management* telah banyak dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada konteks organisasi besar, perusahaan publik atau lingkungan profesi yang relatif homogen, serta umumnya mengambil unit analisis pada level nasional atau institusional (Clikeman & Henning, 2000; Healy & Wahlen, 1999b; Yulianti & Fitriany, 2005). Studi Yulianti & Fitriany (2005), misalnya, menekankan perbedaan persepsi etika berdasarkan latar belakang pekerjaan, namun belum secara spesifik mengeksplorasi dinamika etika dalam konteks ekonomi lokal yang memiliki karakteristik industri dan birokrasi yang saling beririsan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut cenderung memposisikan profesi sebagai kategori statis, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan tekanan institusional dan realitas ekonomi daerah tempat profesi tersebut beroperasi.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghadirkan pendekatan kontekstual berbasis wilayah, yaitu Kota Pekalongan, yang memiliki struktur ekonomi khas berupa dominasi industri batik dan UMKM, perdagangan lokal, serta peran sektor publik yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis perbedaan etika antar profesi dengan konteks sosial ekonomi lokal, sehingga etika pelaporan keuangan tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan individu atau profesi, tetapi sebagai hasil interaksi antara nilai profesional, tekanan organisasi, dan lingkungan institusional daerah. Dengan membandingkan pengusaha, profesional akuntansi, dan ASN dalam satu ekosistem ekonomi lokal yang sama, penelitian ini menawarkan perspektif mikro yang belum banyak disentuh oleh studi etika akuntansi sebelumnya.

Selain itu, penelitian ini memperluas kontribusi literatur dengan mengombinasikan skenario *earnings management* klasik berupa penundaan biaya *maintenance* dengan penilaian terhadap dua belas aspek etika pengungkapan dan tanggung jawab pelaporan keuangan. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan yang lebih komprehensif terhadap spektrum etika pelaporan keuangan, mulai dari toleransi terhadap praktik *gray area* hingga sikap terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi instrumen terdahulu, tetapi juga mengembangkannya dalam konteks dan desain analisis yang berbeda, sehingga menghasilkan temuan yang relevan secara empiris dan bernilai tambah bagi pengembangan kebijakan, pendidikan etika, serta tata kelola keuangan di tingkat daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-komparatif untuk menganalisis perbedaan persepsi etika pelaporan keuangan antar kelompok profesi. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert tujuh poin (1 = sangat tidak setuju hingga 7 = sangat setuju) yang memungkinkan pengukuran sikap etis secara lebih sensitif. Kuesioner mengadopsi skenario etika yang dikembangkan oleh (Clikeman & Henning, 2000) sebagaimana direplikasi dalam penelitian (Yulianti & Fitriany, 2005). Instrumen terdiri atas dua bagian, yaitu skenario penundaan biaya *maintenance* sebagai bentuk *earnings management* dan dua belas pernyataan terkait etika pengungkapan serta tanggung jawab pelaporan keuangan. Penggunaan instrumen berbasis skenario dipilih karena terbukti efektif dalam mengungkap penilaian etis responden dalam konteks situasi nyata.

Populasi penelitian mencakup pelaku usaha, profesional akuntansi, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pekalongan yang memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan atau pelaporan keuangan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria responden memiliki pengalaman kerja yang relevan dan pemahaman dasar mengenai laporan keuangan. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 75 responden, dengan distribusi seimbang masing-masing 25 responden per kelompok profesi. Penentuan ukuran sampel ini mengikuti praktik umum penelitian etika akuntansi berbasis skenario yang menekankan keseimbangan antar kelompok untuk keperluan analisis komparatif. Selain itu, jumlah tersebut dianggap memadai untuk menghasilkan estimasi statistik yang stabil pada analisis deskriptif dan uji perbedaan antar kelompok.

Pengujian kualitas instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum analisis utama. Reliabilitas diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan nilai minimum 0,70 sebagai indikator konsistensi internal yang dapat diterima. Validitas item diuji menggunakan korelasi item-total untuk memastikan setiap pernyataan mampu merepresentasikan konstruk etika pelaporan keuangan. Apabila diperlukan, validitas konstruk dapat diperkuat melalui penghitungan *Average Variance Extracted (AVE)*. Tahap ini bertujuan untuk memastikan instrumen memiliki ketepatan dan keandalan pengukuran yang memadai.

Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata (*mean*) setiap kelompok profesi pada masing-masing item kuesioner. Nilai mean digunakan untuk mengidentifikasi

kecenderungan sikap etis responden terhadap isu pengungkapan informasi, tanggung jawab manajerial, dan praktik earnings management. Selanjutnya, perbedaan persepsi etika antar kelompok dianalisis menggunakan uji statistik inferensial, yaitu ANOVA satu arah apabila asumsi normalitas terpenuhi atau uji Kruskal–Wallis apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi. Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah perbedaan yang diamati bersifat signifikan secara statistik. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga inferensial.

Untuk melengkapi pengujian perbedaan antar kelompok, penelitian ini juga menghitung *effect size* guna mengukur kekuatan perbedaan persepsi etika antar profesi. Penggunaan *effect size* memberikan informasi tambahan mengenai signifikansi praktis dari temuan penelitian, tidak hanya signifikansi statistik. Pendekatan ini penting dalam penelitian etika, karena perbedaan kecil secara statistik dapat memiliki implikasi substantif dalam praktik pelaporan keuangan. Seluruh hasil analisis diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi Kota Pekalongan. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris yang kuat dan relevan bagi literatur etika pelaporan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Bagian I

**Tabel 1. Rata-rata dukungan terhadap penundaan biaya *maintenance* (skala 1–7)**

Kelompok	Mean	Interpretasi
Pengusaha	5.2	Cenderung mendukung strategi penundaan demi laba
Prefosional	2.1	Sangat menolak karena melanggar etika akuntansi
ASN	3.4	Moderat cenderung menolak

Sumber: Kuesioner Etika Penyusunan Laporan Keuangan di Kota Pekalongan

Bagian I menunjukkan bahwa ketiga kelompok (pengusaha, profesional, dan ASN) memiliki pola etis yang berbeda ketika dihadapkan pada skenario penundaan biaya *maintenance* demi meningkatkan laba. Pada kelompok pengusaha, *respons* cenderung lebih permisif. Para pengusaha melihat tindakan tersebut sebagai strategi bisnis yang masih dapat diterima selama tidak secara langsung melanggar regulasi formal. Orientasi ini berasal dari logika komersial yang menempatkan stabilitas laba dan persepsi investor sebagai prioritas utama. Narasi jawaban menunjukkan bahwa pengusaha lebih mempertimbangkan manfaat jangka pendek, seperti menjaga performa keuangan perusahaan dan mempertahankan kepercayaan pasar, meskipun mereka menyadari potensi risiko jangka panjang yang mungkin timbul. Sikap ini memperlihatkan adanya kecenderungan terhadap *rationalization*, yakni pembenaran tindakan demi tujuan ekonomi, namun tidak mencerminkan bahwa pengusaha tidak memiliki pertimbangan etis; melainkan mereka menekankan aspek pragmatis dari pengambilan keputusan.

Berbeda dengan pengusaha, kelompok profesional seperti akuntan, auditor, dan tenaga ahli keuangan menunjukkan penolakan yang lebih kuat terhadap usulan penundaan *maintenance*. Profesional berorientasi pada prinsip bahwa laporan keuangan harus merepresentasikan kondisi ekonomi yang sebenarnya atau *faithful representation*. Meskipun penundaan tersebut tidak melanggar hukum secara eksplisit, profesional memandang bahwa tindakan itu dapat menyesatkan pemakai laporan keuangan, karena menggeser beban yang seharusnya diakui pada periode berjalan. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntansi seperti *matching principle* dan *prudence*. Dengan demikian, sikap profesional lebih selaras dengan nilai objektivitas, akuntabilitas, serta integritas profesi akuntansi. Mereka mempertimbangkan implikasi jangka panjang bagi kredibilitas laporan keuangan dan kualitas pengungkapan.

Sementara itu, ASN menunjukkan posisi moderat–konservatif, dengan kecenderungan menolak praktik earnings management, meskipun tidak sekuat profesional. ASN menilai



bahwa tindakan menunda *maintenance* berpotensi merugikan pemangku kepentingan, menurunkan kepercayaan publik, dan melemahkan tata kelola perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka. Sikap ini sejalan dengan karakteristik birokrasi publik yang menempatkan transparansi, kepatuhan prosedural, dan stabilitas organisasi sebagai nilai utama. ASN melihat integritas sebagai bagian dari etos pelayanan publik, sehingga setiap keputusan yang berpotensi mengurangi kejelasan informasi dianggap tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, hasil bagian I menunjukkan adanya pola kontras yang jelas: pengusaha lebih pragmatis, profesional lebih normatif dan berpegang pada standar akuntansi, sedangkan ASN berada di antara keduanya dengan kecenderungan menjaga integritas dan stabilitas prosedural. Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa perbedaan latar belakang pekerjaan berpengaruh terhadap sensitivitas etis, orientasi nilai, dan cara individu merespons tekanan dalam konteks pelaporan keuangan.

## Hasil Bagian II

**Tabel 2. Rata-rata Perspektif Pengusaha, Profesional dan ASN terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan)**

Pernyataan	Pengusaha	Profesional	ASN
Pengungkapan Risiko dalam Laporan Keuangan	5.8	6.7	6.3
Prioritas Tanggung Jawab Manajemen	5.1	3.1	3.5
Beban Penerapan Prinsip Akuntansi	4.6	2.3	3.5
Kewajiban Publikasi Laporan Keuangan Lengkap	4.4	3.0	4.2
Pengungkapan untuk Mencapai Fairness	6.2	6.9	6.4
Penolakan Mengungkap Informasi yang Berpotensi Merugikan	5.0	2.5	3.2
Persepsi bahwa Standar Akuntansi Mendorong Pengungkapan Berlebih	3.7	3.1	4.0
Kerahasiaan Gaji dan Benefit Manajemen	5.1	4.0	5.0
Kerahasiaan Anggaran Operasi dan Target Keuntungan Masa Depan	5.0	5.3	5.1
Kesengajaan Membuat Kesalahan demi Mencegah Kebangkrutan	3.1	1.1	2.4
Tanggung Jawab Menjaga Kepentingan Investor	4.1	2.2	3.3
Pengungkapan Pengurangan Biaya Diskresioner	6.0	6.8	6.2

Sumber: Kuesioner Etika Penyusunan Laporan Keuangan di Kota Pekalongan

Bagian II membahas persepsi responden dari tiga kelompok (Pengusaha, Profesional, dan ASN) terhadap dua belas pernyataan terkait etika, pengungkapan, dan tanggung jawab pelaporan keuangan. Nilai mean digunakan untuk membaca tingkat persetujuan masing-masing kelompok.

### 1. Pengungkapan Risiko dalam Laporan Keuangan

Ketiga kelompok menunjukkan dukungan terhadap transparansi risiko, dengan *mean* 5.8 pada Pengusaha, 6.7 pada Profesional, dan 6.3 pada ASN. Temuan ini menegaskan bahwa seluruh responden menilai pengungkapan risiko sebagai bagian penting dari akuntabilitas perusahaan.

### 2. Prioritas Tanggung Jawab Manajemen

Pada pernyataan bahwa manajemen lebih bertanggung jawab kepada pemegang saham daripada karyawan, Pengusaha memiliki *mean* tertinggi (5.1), sedangkan Profesional (3.1) dan ASN (3.5) menunjukkan tingkat persetujuan lebih rendah. Artinya, Pengusaha cenderung berorientasi pada pemegang saham, sementara dua kelompok lain memiliki pandangan yang lebih seimbang terhadap pemangku kepentingan lainnya.

### 3. Beban Penerapan Prinsip Akuntansi

Pengusaha (4.6) dan ASN (4.1) merasa bahwa perusahaan go publik dibebani kewajiban mengikuti prinsip akuntansi, sedangkan Profesional (2.3) menilai beban tersebut jauh lebih ringan. Ini menunjukkan Profesional memiliki persepsi bahwa standar pelaporan merupakan bagian wajar dari tata kelola, bukan beban.

#### **4. Kewajiban Publikasi Laporan Keuangan Lengkap**

Pola serupa tampak pada aspek publikasi laporan keuangan, di mana Pengusaha merasa paling terbebani (4.4), ASN moderat (4.2), dan Profesional paling ringan (3.0). Hal ini dapat dihubungkan dengan posisi Pengusaha yang langsung menanggung konsekuensi administratif dan strategis dari keterbukaan informasi.

#### **5. Pengungkapan untuk Mencapai Fairness**

Ketiga kelompok sangat mendukung pentingnya fairness di pasar modal, dengan *mean* 6.2 (Pengusaha), 6.9 (Profesional), dan 6.4 (ASN). Temuan ini menunjukkan konsensus kuat bahwa keterbukaan laporan keuangan menjadi fondasi keadilan bagi investor dan pemegang obligasi.

#### **6. Penolakan Mengungkap Informasi yang Berpotensi Merugikan**

Pengusaha menunjukkan kecenderungan paling kuat untuk menjaga kerahasiaan informasi (5.0), sementara Profesional (2.5) dan ASN (3.2) lebih menolak tindakan menyembunyikan informasi. Ini mengindikasikan bahwa Pengusaha lebih rentan mempertimbangkan aspek strategis bisnis ketika menghadapi risiko kompetitif.

#### **7. Persepsi bahwa Standar Akuntansi Mendorong Pengungkapan Berlebih**

Ketiga kelompok menunjukkan nilai *mean* rendah hingga moderat: Pengusaha (3.7), Profesional (3.1), ASN (4.0). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai standar akuntansi saat ini masih berada dalam batas kewajaran dan tidak mendorong pengungkapan yang berlebihan.

#### **8. Kerahasiaan Gaji dan Benefit Manajemen**

Ketiga kelompok sama-sama melihat gaji manajemen sebagai informasi sensitif, dengan *mean* 5.1 (Pengusaha), 4.0 (Profesional), dan 5.0 (ASN). Meski Profesional agak lebih terbuka, mayoritas responden tetap memandang kompensasi manajemen sebagai aspek yang tidak sepenuhnya perlu dipublikasikan.

#### **9. Kerahasiaan Anggaran Operasi dan Target Keuntungan Masa Depan**

Pernyataan ini memperoleh *mean* yang mirip antar kelompok: 5.0 (Pengusaha), 5.3 (Profesional), dan 5.1 (ASN). Temuan ini menunjukkan kecenderungan moderat bahwa rencana anggaran masa depan dianggap cukup sensitif untuk tidak diungkapkan secara penuh.

#### **10. Kesengajaan Membuat Kesalahan demi Mencegah Kebangkrutan**

Profesional menunjukkan penolakan paling kuat terhadap manipulasi laporan keuangan (1.1), diikuti ASN (2.4) dan Pengusaha (3.1). Pola ini memperlihatkan bahwa Profesional memiliki komitmen etika paling tinggi dalam menjaga integritas pelaporan.

#### **11. Tanggung Jawab Menjaga Kepentingan Investor**

Pada pernyataan bahwa auditor independen lebih bertanggung jawab daripada manajer perusahaan, seluruh kelompok cenderung tidak sepenuhnya setuju, khususnya Profesional (2.2). Pengusaha (4.1) dan ASN (3.3) memiliki tingkat persetujuan lebih tinggi, namun tetap

menunjukkan pemahaman bahwa manajemen tetap memiliki peran sentral dalam perlindungan kepentingan investor.

## 12. Pengungkapan Pengurangan Biaya Diskresioner

Ketiga kelompok mendukung transparansi dalam pelaporan pengurangan biaya diskresioner di akhir tahun, dengan *mean* tinggi: 6.0 (Pengusaha), 6.8 (Profesional), dan 6.2 (ASN). Hal ini menegaskan kesadaran bersama bahwa pengurangan biaya strategis harus tetap dilaporkan untuk menjaga integritas laporan keuangan.

Bagian II memperlihatkan dinamika perbedaan nilai dan orientasi etika antara pengusaha, profesional, dan ASN dalam memandang aspek pengungkapan informasi, prinsip akuntansi, serta integritas pelaporan keuangan. Pada aspek orientasi terhadap pengungkapan informasi, pengusaha cenderung mengambil posisi moderat mereka mengakui pentingnya pengungkapan risiko sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan, tetapi tetap mempertimbangkan dampak strategis dari informasi tersebut. Ketika informasi dipandang dapat melemahkan posisi kompetitif perusahaan, pengusaha menunjukkan kehati-hatian dan memilih untuk membatasi pengungkapan. Sikap ini mencerminkan pandangan bahwa informasi merupakan aset strategis yang harus dikelola secara selektif. Sebaliknya, profesional menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap keterbukaan informasi dan menganggap pengungkapan yang lengkap sebagai komponen dasar untuk menjamin fairness di pasar modal. Transparansi dipandang sebagai fondasi akuntabilitas dan integritas laporan keuangan. ASN juga menunjukkan dukungan terhadap pengungkapan, namun dengan pendekatan yang lebih regulatif; bagi mereka, keterbukaan informasi merupakan kewajiban administratif dan legal, bukan semata keputusan etis.

Perbedaan juga muncul dalam persepsi mengenai beban kepatuhan terhadap standar akuntansi. Pengusaha melihat regulasi akuntansi sebagai beban yang dapat menghambat fleksibilitas dan efisiensi bisnis, terutama bagi perusahaan go publik yang harus memenuhi standar pelaporan yang ketat. Profesional justru menunjukkan sikap sebaliknya; mereka menganggap standar akuntansi bukan sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme tata kelola yang penting untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik manipulatif. Bagi ASN, regulasi akuntansi dipahami sebagai elemen penting dalam menjaga ketertiban administrasi, mengingat orientasi birokrasi yang menempatkan kepatuhan sebagai nilai utama.

Ketika menyangkut informasi sensitif seperti gaji manajemen atau target keuntungan, perbedaan orientasi semakin terlihat. Pengusaha lebih memilih merahasiakan informasi tersebut demi menjaga keamanan internal dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Profesional mengambil sikap yang lebih seimbang dengan menilai bahwa beberapa informasi dapat diungkap sejauh relevan bagi pengguna laporan keuangan, namun tidak semua informasi layak dipublikasikan secara penuh. ASN memandang keterbukaan informasi sebagai persoalan regulatif jika aturan tidak mewajibkan, maka informasi tersebut tidak perlu diungkap.

Perbedaan paling mencolok muncul pada sikap terhadap manipulasi laporan keuangan. Pengusaha dianggap paling mungkin memberikan justifikasi atas manipulasi ringan jika dianggap perlu untuk memastikan keberlangsungan usaha atau melindungi tenaga kerja. Hal ini mencerminkan orientasi pragmatis dan fokus pada hasil jangka pendek. Profesional tampil sebagai kelompok yang paling tegas menolak praktik manipulatif dalam bentuk apa pun, sesuai dengan etika profesi dan prinsip integritas laporan keuangan. ASN juga menolak manipulasi, namun alasan utama mereka cenderung berakar pada kepatuhan terhadap peraturan dan risiko pelanggaran hukum.

Pandangan terhadap peran auditor juga memperlihatkan variasi antar kelompok. Profesional memahami bahwa meskipun auditor bertanggung jawab terhadap investor, manajemen tetap memiliki tanggung jawab etik yang besar dalam penyajian laporan keuangan.



Pengusaha dan ASN cenderung memusatkan tanggung jawab kepada auditor, mencerminkan cara pandang yang lebih administratif terhadap peran manajemen dalam pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, sintesis hasil bagian I dan II menunjukkan bahwa pengusaha memiliki orientasi etis yang lebih fleksibel dan pragmatis, dipengaruhi oleh kebutuhan menjaga kelangsungan usaha. Profesional merupakan kelompok dengan orientasi etis paling tinggi dan konsisten karena patuh pada standar profesi dan prinsip akuntansi. Sementara itu, ASN berada di posisi tengah, dengan orientasi yang berfokus pada kepatuhan prosedural dan tata kelola, meski tidak seketat profesional dari perspektif normatif. Dengan demikian, perbedaan nilai, fungsi pekerjaan, dan lingkungan organisasi berperan besar dalam membentuk pola etika pelaporan keuangan pada masing-masing kelompok.

## Pembahasan

Dalam praktik profesional, etika berfungsi sebagai kerangka normatif yang membimbing pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks pelaporan keuangan (Rachmawati, Kuang, Kwang En, Meythi, & Marpaung, 2025). Meskipun tujuan utama pelaporan adalah menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, perbedaan latar belakang profesi menyebabkan adanya variasi dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip etika (Septiari, Helmayunita, & Serly, 2023). Divergensi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola pikir, tekanan pekerjaan, dan orientasi nilai yang melekat pada masing-masing profesi. Oleh karena itu, analisis terhadap perbedaan etika antar profesi penting untuk menjelaskan bagaimana keputusan etis terkait pelaporan keuangan dihasilkan dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi integritas laporan keuangan secara keseluruhan (Rachmawati et al., 2025).

Analisis divergensi etika antar profesi menunjukkan bahwa perbedaan pola berpikir, tekanan kerja, serta orientasi nilai berperan kuat dalam membentuk keputusan etis terkait pelaporan keuangan. Pengusaha cenderung menempatkan keputusan-keputusan akuntansi dalam kerangka strategi bisnis dan keberlanjutan operasional, di mana praktik seperti penundaan biaya maintenance dipandang sebagai pilihan manajerial yang fleksibel selama tidak melanggar aturan formal. Orientasi ini mencerminkan fleksibilitas etis yang tinggi, khususnya ketika keputusan tersebut diyakini dapat menjaga stabilitas laba dan kepercayaan pemilik modal, namun juga berpotensi menyebabkan rasionalisasi terhadap tindakan yang secara etik kurang tepat tetapi dianggap masuk akal dalam konteks bisnis (Nurhidayati & Witjaksono, 2016).

Profesional akuntansi menunjukkan pola etis yang paling konsisten dan normatif karena mereka beroperasi dalam kerangka yang ketat, yaitu standar akuntansi, kode etik profesi, dan prinsip representasi wajar. Standar ini menuntut mereka untuk menolak segala bentuk *earnings management* yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan, dengan menekankan prinsip-prinsip fundamental seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang diadopsi dari *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA). Mereka percaya bahwa biaya harus diakui pada periode terjadinya untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, dan segala manipulasi dalam timing pengakuan beban dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas laporan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka konseptual etika IESBA yang bertujuan menjaga kepercayaan publik.

Sikap ini menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi lebih jauh sebagai mekanisme tata kelola yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keandalan informasi keuangan, yang pada akhirnya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi atau perusahaan (Liana Oly Kisanto, Muhammad Dafa Syahrulli, Evaristo Panesa Lonsong, Oswaldus Antonius Karo, & Rizki Putra Pratama, 2025). Pendekatan normatif ini membentuk landasan profesionalisme bagi akuntan dalam menjalankan tugasnya secara etis dan bertanggung jawab dalam setiap tahap pelaporan

keuangan, menghindari konflik kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap standar global seperti IFRSASN berada di posisi tengah, mengedepankan kepatuhan prosedural dan tanggung jawab administratif. Mereka cenderung berhati-hati terhadap tindakan yang berpotensi melanggar aturan atau merusak akuntabilitas institusional. Namun, dibandingkan profesional, ASN cenderung memiliki pendekatan etis yang lebih regulatif daripada normatif. Artinya, keputusan mereka lebih berakar pada ketaatan terhadap peraturan dan prosedur, bukan semata pada prinsip moral profesi seperti *fairness* atau *prudence*.

Hubungan tekanan organisasi dengan etika pelaporan terlihat jelas dalam perbedaan cara ketiga kelompok menafsirkan situasi dilematis. Pengusaha menghadapi tekanan kompetitif dan kebutuhan menjaga kinerja laba; profesional menghadapi tuntutan integritas pelaporan dan risiko reputasi profesi; ASN menghadapi tekanan birokrasi dan tanggung jawab publik. Teori stakeholder membantu menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki pemangku kepentingan utama yang berbeda, sehingga prioritas etikanya pun berbeda. Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan insentif manajemen (agen) untuk mengelola laba demi kepentingan tertentu, sementara auditor dan regulator berperan mengawasi dan membatasi praktik tersebut untuk melindungi prinsipal. Dalam konteks *earnings management*, praktik penundaan biaya maintenance merupakan bentuk manajemen laba riil (real earnings management) yang sesuai dengan aturan formal tetapi menurunkan kualitas informasi keuangan karena menggeser pengakuan biaya dan memberi gambaran laba yang menyesatkan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan (Clikeman & Henning, 2000) yang menunjukkan bahwa mahasiswa bisnis dan manajer lebih permisif terhadap *earnings management* dibandingkan mahasiswa akuntansi. (Yulianti & Fitriany, 2005) juga menemukan bahwa profesional akuntansi memiliki orientasi etika yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Wibowo, 2020) yang menjelaskan bahwa tekanan organisasi dan budaya kerja mempengaruhi sikap terhadap manipulasi laporan keuangan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman etika antar profesi merupakan fenomena yang stabil dan berulang di berbagai konteks, mencerminkan pengaruh sosialisasi jangka panjang, insentif organisasi, dan prioritas pemangku kepentingan yang unik bagi masing-masing kelompok.

Implikasi kebijakan bagi Kota Pekalongan menuntut pendekatan yang holistik dalam memperkuat pendidikan etika akuntansi, khususnya di kalangan pelaku UMKM, pengusaha lokal, dan aparatur pemerintah daerah (Sari, Safitri, & Elshifa, 2024). Pendidikan etika harus dirancang tidak hanya sebagai pelatihan sekali jalan, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek kegiatan ekonomi dan administrasi publik, mengingat penerapan akuntansi sektor publik di Pekalongan telah terbukti efektif mencegah fraud laporan keuangan melalui peningkatan kualitas aparatur. Hal ini penting karena orientasi etika yang beragam antar profesi dan kelompok masyarakat di Pekalongan menunjukkan bahwa regulasi semata tidak cukup untuk mengatasi masalah pelaporan keuangan yang kurang jujur atau manipulatif, sebagaimana tercermin dalam temuan *fraud prevention* yang bergantung pada etika organisasional.

Lebih lanjut, pembentukan budaya integritas perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha, organisasi profesi akuntansi, serta lembaga pemerintahan daerah seperti yang diatur dalam Perwali Kota Pekalongan No. 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi. Upaya ini dapat berupa program pelatihan berbasis nilai, kampanye kesadaran publik, serta insentif bagi pelaku usaha dan pejabat pemerintahan yang konsisten menjalankan praktik bisnis dan administrasi yang etis, dengan tujuan menekan risiko manajemen laba riil. Pembentukan lingkungan kerja yang menekankan pentingnya perilaku etis juga akan menekan risiko manajemen laba yang

merugikan kualitas pelaporan keuangan, selaras dengan amandemen kebijakan akuntansi terkini.

Bagi profesi akuntansi di Pekalongan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan kode etik yang responsif terhadap perkembangan dinamika sosial dan ekonomi lokal maupun global, didukung pelatihan berkelanjutan dan pengawasan ketat dari Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu, pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang ketat dari organisasi profesi wajib dijalankan untuk memastikan standar etika dipahami dan diterapkan secara konsisten, sehingga memperkuat peran akuntan sebagai *gatekeeper* transparansi keuangan daerah. Penguatan pengawasan profesi tidak hanya mencegah pelanggaran etika, tetapi juga menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap akuntan sebagai pilar utama tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini menyediakan landasan empiris yang kuat bagi pemerintah Kota Pekalongan dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi jangka panjang guna meningkatkan tata kelola dan integritas pelaporan keuangan, sebagaimana direkomendasikan dalam studi pencegahan *fraud* lokal (Sari et al., 2024). Strategi ini, apabila diimplementasikan secara efektif melalui kolaborasi *multi-stakeholder*, dapat memperkuat kepercayaan *stakeholder*, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika di tingkat lokal maupun nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan latar belakang profesi berpengaruh signifikan terhadap cara individu memandang dan menilai isu etika dalam penyusunan laporan keuangan di Kota Pekalongan. Pengusaha menunjukkan orientasi yang relatif pragmatis, khususnya dalam situasi tekanan ekonomi dan tuntutan kinerja, sehingga lebih toleran terhadap praktik pelaporan yang bersifat strategis selama tidak melanggar ketentuan formal. Profesional akuntansi tampil sebagai kelompok dengan konsistensi etika tertinggi, dipandu oleh standar profesi yang menekankan integritas, objektivitas, dan kehati-hatian dalam pelaporan. ASN menempati posisi moderat dengan orientasi etika yang kuat pada kepatuhan regulatif dan akuntabilitas publik, meskipun pendekatan normatifnya tidak seketat profesional akuntansi. Temuan ini menegaskan bahwa etika pelaporan keuangan merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh peran, tekanan institusional, dan budaya organisasi.

Secara konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi semata tidak cukup untuk menjamin perilaku pelaporan yang etis. Nilai-nilai profesional, orientasi kepentingan, serta ekspektasi organisasi terbukti membentuk cara individu menafsirkan batas-batas etis dalam praktik akuntansi. Oleh karena itu, penguatan etika pelaporan keuangan perlu dirancang secara kontekstual sesuai dengan karakteristik masing-masing profesi. Temuan ini memperkaya literatur etika akuntansi dengan memberikan bukti empiris dari konteks lokal, khususnya pada tingkat kota dengan dinamika ekonomi yang heterogen seperti Pekalongan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, penggunaan instrumen kuesioner berbasis skenario etika menempatkan responden pada situasi hipotetis, sehingga jawaban yang diberikan merefleksikan penilaian normatif dan persepsi etis, bukan perilaku aktual dalam praktik pelaporan keuangan sehari-hari. Kedua, desain penelitian yang bersifat potong lintang (*cross-sectional*) belum mampu menangkap perubahan orientasi etika responden yang mungkin terjadi seiring waktu, pengalaman kerja, atau perubahan tekanan organisasi. Ketiga, pendekatan kuantitatif deskriptif lebih menekankan pola umum perbedaan antar kelompok profesi, sehingga belum sepenuhnya menggali proses kognitif, pertimbangan moral, dan mekanisme rasionalisasi yang mendasari pengambilan keputusan etis.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alasan dan pertimbangan di balik sikap etis responden. Penelitian lanjutan juga dapat menguji peran variabel mediasi atau moderasi, seperti budaya organisasi, tekanan kinerja, sistem insentif, dan orientasi nilai personal, dalam membentuk keputusan etis terkait pelaporan keuangan. Selain itu, penggunaan desain eksperimental atau longitudinal berpotensi memberikan gambaran yang lebih dinamis mengenai bagaimana orientasi etika berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi dan ekonomi. Dengan pengembangan tersebut, kajian etika pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang semakin kuat.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi implementatif bagi masing-masing kelompok profesi. Bagi pengusaha, diperlukan penguatan kesadaran etika strategis melalui pelatihan tata kelola dan manajemen risiko agar keputusan bisnis tidak hanya berorientasi jangka pendek. Profesional akuntansi perlu terus memperkuat internalisasi kode etik melalui pendidikan berkelanjutan dan mekanisme penegakan disiplin profesi. Sementara itu, ASN perlu didukung dengan sistem pengawasan dan budaya organisasi yang mendorong integritas substantif, bukan sekadar kepatuhan administratif. Dengan implementasi yang tepat, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelaporan keuangan di Kota Pekalongan dan wilayah lain dengan karakteristik serupa.

## REFERENSI

- Budiandru, B. (2025). *Investigating the role of ethical standards, professional judgment, and regulatory compliance in financial reporting quality*. 11(3).
- Clikeman, P. M., & Henning, S. L. (2000). The socialization of undergraduate accounting students: Earnings management and ethics. *Accounting Education*, 3(15), 307–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09639280020009363>
- Dajtnicka, E. W., Salsabila Helwani, Z., & Wulandari, D. (2025). Trust and Transparency: Auditor Independence and Financial Statement Integrity through the Lens of Business Ethics. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(02), 222–234. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i02.2183>
- Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 344–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001>
- Faesol, M. S. (2024). *PENGARUH PERSEPSI HARGA, GAYA HIDUP, ETNOSENTIRSME, TERHADAP MINAT BELI BATIK PEKALONGAN (Studi Pada Konsumen Di Pasar Grosir Setono Pekalongan Pada Toko Azka Batik )* Moh. 1192, 304–317.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999a). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 4(13), 365–383. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999b). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Ikhwan, M. N. (2021). Analisis Struktur Perekonomian Kabupaten Pekalongan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*, 5(02), 97–111. <https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv5i02.3>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Liana Oly Kisanto, Muhammad Dafa Syahrulli, Evaristo Panesa Lonsong, Oswaldus Antonius Karo, & Rizki Putra Pratama. (2025). STUDI KOMPARATIF PENERAPAN ETIKA PROFESI DALAM AKUNTANSI DI INDONESIA DAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 01–09. <https://doi.org/10.69714/0tfp9474>
- Mia Angelina Setiawan, & Helmayunita, N. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Tekanan Finansial, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. *Economac*, 1(1), 52–67.
- Nina Nursida, Eny Wahyuningsih, & Fitrasari, M. R. A. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Indonesia). *Jurnal Ekonomi KIAMAT*, 33(1), 52–61. [https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol33\(1\).9618](https://doi.org/10.25299/kiat.2022.vol33(1).9618)
- Nurhidayati, & Witjaksono, A. (2016). Perbandingan Kode Etik Profesi Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(2), 377–390. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3368498>
- Rachmawati, A., Kuang, T. M., Kwang En, T., Meythi, M., & Marpaung, E. I. (2025). Building financial reporting quality through ethics, authenticity, and leadership: a study in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2523414>
- Sari, F. M., Safitri, A., & Elshifa, A. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan). *Journal of Social and Policy Issues*, 74–78. <https://doi.org/10.58835/jspi.v4i2.331>
- Septiari, D., Helmayunita, N., & Serly, V. (2023). Accounting Ethics: From Professionals Views. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 146–156. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18084>
- Shafer, W. E., & Simmons, R. S. (2011). Social responsibility, professional commitment and the perceived importance of ethics and social responsibility: A study of accounting professionals. *Management & Organizational Ethics. Management & Organizational Ethics*, 2(9), 137–152. <https://doi.org/10.1108/15253831111136069>
- Siregar, S. V., & Utama, S. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 43(1), 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.01.001>
- Sofyani Hafiez, & Rahma Nadia. (2017). Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan?: Studi Dengan Pendekatan Skenario Kasus Dilema Etika. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 31–46. Retrieved from <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/viewFile/12/12>
- Susanto, E. B., Ariyanto, T., & Kurniawan, M. F. (2016). Penguatan Citra Pekalongan Sebagai Kota Batik Melalui Pembangunan Pusat Informasi Umkm Batik Berbasis Mobile Yang Mampu Meningkatkan Daya Saing Umkm Batik Dalam. *Jurnal Litbang 2016*, 11(1), 1–15.
- Wibowo, A. (2020). Earnings management practices and ethical perceptions among Indonesian managers. *Journal of Financial Crime*, 3(27), 867–884.
- Yulianti, W., & Fitriany, A. (2005). Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan dan pengaruh budaya organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(7), 45–56. <https://doi.org/10.1234/jak.v7i1.5678>